

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain;

1. Analisis Pengelolaan Belanja Desa pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, yaitu dalam proses pengelolaan belanja desa terdiri dari 5 (lima) tahap:
 - a) Tahap Perencanaan masih belum berjalan efektif, dilihat dari musrenbang yang diadakan tim pelaksanaan pengelolaan belanja desa, karena dalam kegiatan musrenbang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, hal ini disebabkan kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat.
 - b) Tahap Pelaksanaan masih belum berjalan efektif, karena penggunaan anggaran pengelolaan belanja desa tidak dapat terselesaikan dengan baik dan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan belanja desa yang dilakukan di Desa Kuanheun masih belum efektif.
 - c) Tahap Penatausahaan sudah berjalan efektif, karena pemerintah desa kuanheun sudah melakukan sesuai aturan bahwa adanya

penatausahaan yang dilakukan bendahara desa berupa buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank.

- d) Tahap Pelaporan masih belum berjalan efektif, karena pemerintah desa kuanheun belum sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dimana pemerintah desa masih belum mampu untuk melaporkan kegiatan sesuai dengan jadwal waktu yang ditentukan terlihat dari belum rampungnya laporan tahap kedua semester akhir.
- e) Tahap pertanggungjawaban dalam proses pengelolaan belanja desa masih belum berjalan efektif, karena pemerintah desa masih mengalami kesulitan dalam dalam menyusun laporan pertanggungjawaban. Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Kuanheun lebih dilandaskan pada pengalaman, akan tetapi lamanya bekerja belum tentu menjadikan perangkat desa dapat mengikuti perubahan-perubahan terhadap pengelolaan anggaran dan teknologi informasi yang ada. Serta tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Kuanheun. Tahapan pengelolaan belanja desa tersebut belum sesuai dengan prinsip pengelolaan dan tujuan pengelolaan belanja desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat pengelolaan belanja desa pada Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang yaitu kualitas sumber daya

manusia yang terbatas, kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat dan tidak adanya partisipasi masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dilakukan pelatihan-pelatihan kepada Desa Kuanheun guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), sehingga tidak terjadi penumpukkan pekerjaan seperti penyusunan APBDes kepada satu orang saja atau bendahara.
2. Pemerintah Desa Kuanheun perlu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi, dan Akuntansi. Pemerintah desa juga perlu mengikuti pelatihan secara berkelanjutan dan merata, kemudian dilakukan evaluasi kinerja perangkat desa untuk mengetahui sejauh mana perangkat desa menguasai dan menerapkan ilmu yang didapat dalam pelatihan yang diikuti.
3. Perlunya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Jatmiko. (2012:393). *Kontribusi dan Peran Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Yang Transparan dan Akuntabel*. Jurnal Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.
- Bintarto, R 1983, *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*, Ghalia Indonesia Yogyakarta.
- Dokumen APB-Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2018.
- Dokumen APB-Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2019.
- Dokumen APB-Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2020.
- Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2018.
- Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2019.
- Dokumen Laporan Realisasi Anggaran Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang tahun Anggaran 2020.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*. Universitas Diponegoro.
- Karimah, Faizatul. Saleh, Choirul. dan Wanusmawatie, Ike. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik*. UniversitasBrawijaya.
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 2004. *DESA*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kholmi, Masiyah. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Studi Di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Journal of Innovation in Business and Economics (JIBE)*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Nawawi, Hadari dan M. Martini Hadari. 1992. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu (Edisi Kedua)*. Banda Aceh: Read.

- Sutardjo, Kartohadikusumo, 1953, *Desa*, Yogyakarta : Indonesia Monographs.
- Tim P3M-OTDA dan GOOD GOVERNANCE CARE Jawa Timur, *Panduan Pemberdayaan Badan Perwakilan Desa (BPD)*. Surabaya: Kreasindo Media Graha
- Umami, Risya dan Idang Nurodin. 2017. Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Pajak dan Manajemen*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Wida. Siti Ainul dkk. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. Universitas Jember.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT raja Grafindo Persada.